



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT



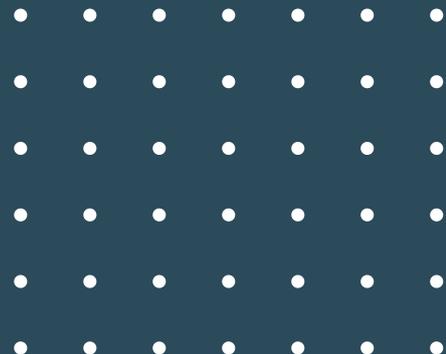
RENJA

RENCANA KERJA

2024

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JL. SALAK NO. 32 GUNTUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
www.penghubung.kalbarprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah ini diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja yang kemudian untuk penyempurnaannya akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama seluruh stakeholders terkait dalam forum OPD sebagai wadah partisipatif guna menghasilkan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kata Pengantar yang memuat tentang ilustrasi dan sistematika laporan
2. Bab I Pendahuluan, Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
3. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. Bagian ini berisi penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penghubung Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
4. Bab III Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat. Pada bagian ini menjelaskan mengenai telaahan rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dan sasaran-sasaran berdasarkan rumusan tujuan tersebut, berdasarkan isu-isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung.
5. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat. Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.
6. Bab V Penutup, Bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah- kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan bahan acuan dalam

pelaksanaan Pembangunan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta, saran dan kritik sangat di harapkan guna perbaikan program, kegiatan serta penyempurnaan RENJA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat kedepan.

Jakarta, 31 Maret 2023

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Kalimantan Barat



ABDUL GANI, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP.197208211997031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I	5
1.1. LATAR BELAKANG	5
1.2. LANDASAN HUKUM	7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	11
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022	11
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN	13
1. ASPEK KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT:	13
a. Kedudukan	13
b. Tugas	13
c. Fungsi.....	14
d. Susunan Organisasi	15
e. Sumber Daya Aparatur.....	18
f. Sumber Daya Keuangan	19
2. ASPEK SARANA DAN PRASARANA.....	21
3. ASPEK PELAYANAN URUSAN WAJIB.....	21
2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	23
1. Program : Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemda (Penghubung)	23
Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Gubernur dan DPR, DPD RI serta pejabat lainnya.....	23
2. Program : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemda	24
a. Kegiatan: Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah / Wakil dan Pejabat Daerah	24
b. Kegiatan: Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	24
c. Kegiatan: Penyediaan jasa penggunaan tanah, bangunan Gedung dan rumah, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan berupa fasilitasi pembayaran PBB asrama Mahasiswa.....	25
d. Kegiatan : Pengelolaan Mess Daerah	25
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL	25

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ...	26
BAB III	27
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	27
3.2. TUJUAN DAN SASARAN KERJA.....	28
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024.....	32
BAB IV	35
BAB V	44

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Komposisi PNS Berdasarkan Kepangkatan	18
Table 2.2 Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan	18
Table 2.3 Komposisi PNS Berdasarkan	18
Table 2.4 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022.....	19
Table 2.5 Anggaran Belanja Tahun 2022.....	19
Table 2.6 Sarana Dan Prasarana.....	21
Table 2.7 Target Dan Realisasi Program SKPD	22
Table 2.8 Realisasi Anggaran Yang Telah Terserap Untuk Program Kegiatan Core Bisnis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Di Jakarta Tahun 2022	23
Table 3.1 Hubungan Visi / Misi Dan Tujuan / Sasaran Program Kegiatan	28
Table 3.3 Program Dan Kegiatan Prioritas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan & Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	7
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta setiap tahunnya melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mencapai kinerja yang telah di rencanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan visi Kalimantan Barat yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat kalimantan barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

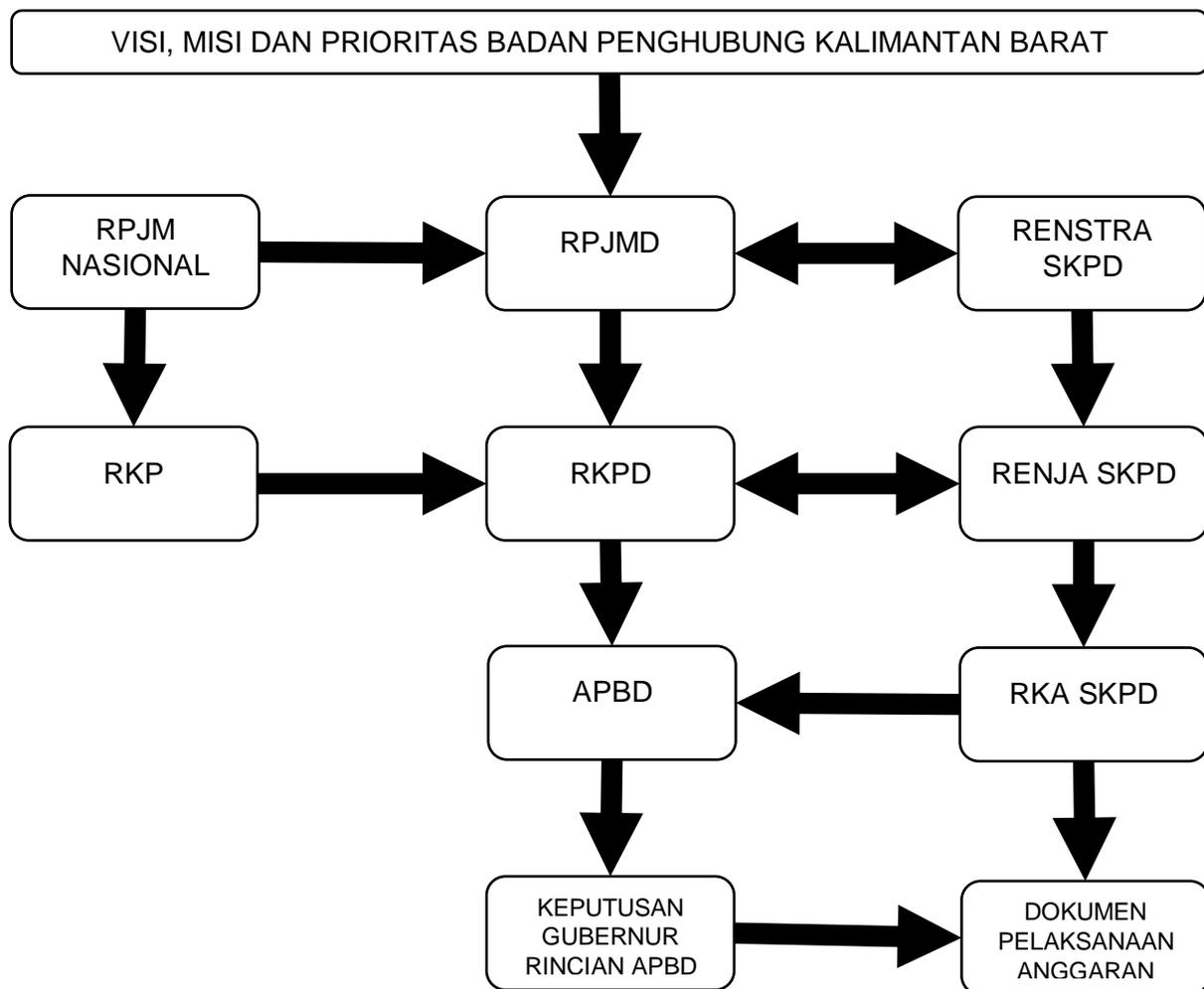
Rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahunan sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan akan sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja. Sedangkan Rencana Strategis menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selaras dengan Rencana Strategis, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif untuk tercapainya sasaran Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penghubung pada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara kendala yang terjadi saat program tersebut dijalankan akan dievaluasi yang kemudian menjadi acuan perumusan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Badan penghubung untuk menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari berbagai pihak akan menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja yang nantinya akan menjadi program prioritas dalam RKPD.

Kebijakan dan rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 disusun berdasarkan pendekatan

pendekatan yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Didalam Rencana Kerja Badan Penghubung ini prioritas program dan kegiatan, penanggung jawab program, indikator hasil kerja serta pembiayaan diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran RPJM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung ditujukan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karenanya rencana kerja Badan Penghubung tahun 2024 harus selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi. Hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat diilustrasikan seperti pada skema berikut :



Gambar 1.1 Hubungan & Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan

- kedua atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan penghubung berdasarkan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 – 2026, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergi antara

perencanaan, penganggaran dan pengawasan Pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, dengan demikian maka Rencana Kerja Badan Penghubung tahun 2024 menjadi dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Jadi pada dasarnya maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat ini akan menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2025 dan memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan / acuan kerja dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun kedepan.
- b. Sebagai acuan dalam menentukan lokasi kegiatan, menyusun indikator kinerja kegiatan, dan kelompok sasaran periode satu tahun kedepan.
- c. Sebagai acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah baik yang berskala Nasional maupun Lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Mengemukakan organisasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta menguraikan fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam proses implementasi pembangunan Tahun 2024 di daerah.

BAB II Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2022

Memuat hasil pencapaian kinerja dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Menjelaskan mengenai isu permasalahan menurut bidang- bidang pembangunan (program dan kegiatan) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

2.4. Review terhadap rancangan awal

Memuat ulasan rancangan awal Program dan Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Memuat penjelasan tentang rancangan tujuan dan sasaran rencana kerja Tahun 2024

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Memuat penjelasan program dan kegiatan Badan Penghubung Tahun 2024

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Mengemukakan tentang rancangan program dan kegiatan Tahun 2024 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.

BAB V Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam Pelaksanaannya, demikian juga Renja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 akan disesuaikan dengan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya (Renja Tahun 2022) yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

1. Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan.
2. Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan.
3. Hasil Rencana Program dan Kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

1. Penempatan Sumber Daya Manusia / sumber daya aparatur yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan tupoksinya.
2. Tujuan yang akan dicapai.
3. Sasaran dari program prioritas / core bisnis SKPD.
4. Kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan serta sub bidang-sub bidang yang akan mewujudkan kebijakan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian Kinerja Tahun 2024 sebagai entry point dalam Penyusunan Perencanaan Tahun 2024.
2. Memperhatikan keberlanjutan (Sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Selama Tahun 2022 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Telah merealisasikan Anggaran APBD Sebesar Rp. 5.892.581.577 yaitu sebesar 94,24% dari total anggaran sebesar Rp. 6.252.770.076 dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai : Rp. 3.522.977.858
2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 2.439.903.718
3. Belanja Modal : Rp. 289.888.500

Capaian angka partisipasi tahun 2022 sebesar 94,24 % sedangkan capaian program sesuai target anggaran sebesar 100 %. Ini berarti telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun Evaluasi hasil pelaksanaan program pembangunan dari urusan wajib tersebut antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat dengan indikator kinerja : Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, Jumlah Hasil Promosi Produk Unggul dan Pelestarian Seni Budaya, dan Jumlah Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.
2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Tahapan dengan indicator kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD, Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD, Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD serta Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
3. Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
4. Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dengan Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
5. Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan indicator kinerja : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
6. Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator kinerja : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor, Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan, Jumlah Paket Bahan/Material, Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
7. Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah dengan indikator kinerja : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jumlah Paket Mebel, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin, Jumlah Unit Aset Tetap, Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Jumlah Unit

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor.

8. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indicator kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
9. Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan indicator kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Salak Nomor 32 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan merupakan salah satu Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. yang terbentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dapat diuraikan beberapa aspek sebagai berikut :

1. ASPEK KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT:

a. Kedudukan

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Badan Penghubung mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah/lembaga- lembaga di Jakarta, mewakili pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengikuti rapat yang tidak bersifat teknis di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan asrama mahasiswa

dan asset Pemerintah Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya, penunjang kegiatan promosi, pengelolaan anjungan daerah, pemberian pelayanan penunjang kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan program kerja di bidang Penghubung;
2. Perumusan kebijakan di bidang Penghubung;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penghubung;
4. Pengkoordinasian dibidang Penghubung;
5. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Penghubung;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penghubung;
8. Penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga- lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
9. Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya;
10. Pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
11. Pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
13. Pelaksanaan reformasi birokrasi , Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan public di lingkungan Badan Penghubung;
14. Pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dan daerah lainnya;
15. Penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur;
16. Pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legialatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
17. Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan.

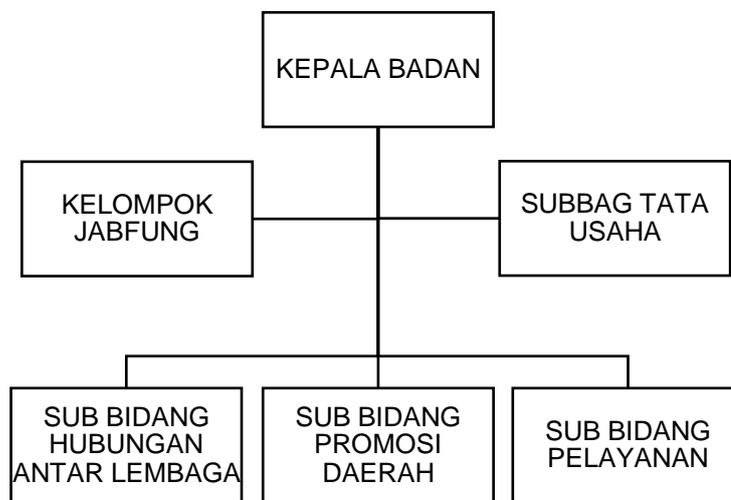
d. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Sub Bidang Promosi
5. Sub Bidang Pelayanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian-bagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI JAKARTA



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

KEPALA BADAN MEMPUNYAI TUGAS-TUGAS ANTARA LAIN :

1. Penetapan program di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah, serta pelayanan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah, serta pelayanan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penghubung daerah;
4. Pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah, serta pelayanan;
5. Penyelenggaraan kegiatan dibidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Badan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan;

8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Penghubung;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan dibidang penghubung;
10. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan dibidang penghubung daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang- undangan.

SUB BAGIAN TATA USAHA MEMPUNYAI TUGAS-TUGAS ANTARA LAIN :

1. Penyusunan dan penyelarasan program kerja Badan serta tata usaha keuangan, asset, aparatur, dan administrasi umum;
2. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi dan tatalaksana Badan, penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan;
4. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
5. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyiapan serta pemeliharaan peralatan dan asset serta rumah tangga Badan;
6. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), DAN Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Penghubung;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
8. Pelaksanaan tugas lain dibidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Badan.

SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA MEMPUNYAI TUGAS :

1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga di Jakarta dan daerah lainnya;
4. Pelaksanaan hubungan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya serta instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
5. Pengelolaan sarana dan prasarana hubungan antar lembaga;
6. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jakarta dan daerah lainnya;
7. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
8. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang hubungan antar lembaga;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang hubungan antar lembaga;

10. Pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan antar lembaga yang diserahkan oleh Kepala Badan.

SUB BIDANG PROMOSI MEMPUNYAI TUGAS-TUGAS ANTARA LAIN :

1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Promosi Daerah;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan promosi daerah;
3. Penyiapan bahan-bahan promosi daerah;
4. Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi sebagai bahan promosi daerah di Jakarta dan daerah lainnya;
5. Memfasilitasi kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana promosi melalui media elektronik dan non elektronik;
7. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan dibidang promosi daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang promosi daerah;
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang promosi daerah yang diserahkan oleh Kepala Badan.

SUB BIDANG PELAYANAN MEMPUNYAI TUGAS ANTARA LAIN ;

1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif pemerintah provinsi kabupaten/kota di Jakarta dan daerah lainnya;
4. Pembinaan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
5. Pengelolaan mess daerah dan asrama Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
6. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan;
7. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah PNS dalam jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan ketrampilan tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan Pegawai Jabatan Fungsional ini dijabat oleh pegawai fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Badan. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

e. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta per 31 Desember 2022 sebanyak 26 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan pangkat / golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

Table 2.1 Komposisi PNS Berdasarkan Kepangkatan

NO.	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2022
1	2	3
1.	Golongan IV/a	2 orang
2.	Golongan III/d	2 orang
3.	Golongan III/c	6 orang
4.	Golongan III/b	5 orang
5.	Golongan III/a	4 orang
6.	Golongan II/d	-
7.	Golongan II/c	5 orang
8.	Golongan II/b	2 orang
9.	Golongan II/a	2 orang
9.	Golongan I/c	-
JUMLAH		26 orang

Table 2.2 Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan

NO.	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2022
1.	Pejabat Struktural Eselon III	1 orang
2.	Pejabat Struktural Eselon IV	4 orang
3.	Staf	22 orang
JUMLAH		26 orang

Table 2.3 Komposisi PNS Berdasarkan

NO.	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2022
1	2	3
1.	S3	1 Orang
2.	S2	1 orang
3.	S1	9 orang

4.	D4	-
5.	Sarmud / D3	6 orang
6.	SLTA	8 orang
7.	SLTP	1 orang
8.	SD	-
JUMLAH		26 orang

f. Sumber Daya Keuangan

1. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah yang bersumber dari sewa Mess Pemprov Kalimantan Barat melalui Badan Penghubung di Jakarta sebagai berikut :

Table 2.4 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2022	KETERANGAN
1.	Retribusi Jasa Usaha	184.430.000,00	Setor ke KasDaerah
JUMLAH		184.430.000,00	

2. Anggaran Tahun 2022 Badan Penghubung sebesar Rp. 6.252.770.076,00 dengan perincian sebagai berikut :

Table 2.5 Anggaran Belanja Tahun 2022

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
A.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.806.580.272,00
B.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.446.189.804,00
1.	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.371.735,00
2.	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.546.545.252,00
3.	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.714.000,00
5.	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.066.000,00
6.	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.401.046,00
7.	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.083.422,00

8.	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394.216.250,00
9.	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.182.567,00
10.	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.446.189.804,00
TOTAL			6.252.770.076,00

2. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan didukung oleh sarana dan prasarana yang merupakan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta. Adapun sarana dan prasarana tersebut dapat digolongkan sebagai asset bergerak dan asset tidak bergerak sebagai berikut :

Table 2.6 Sarana Dan Prasarana

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	JLH	KETERANGAN
1.	Asset Tidak Bergerak		
	Gedung Kantor + Mess		
	a. Gedung Kantor	1	Ruang Kepala Badan
		1	Ruang Rapat
		1	Ruang Kerja
		1	Ruang Tamu
		1	Garasi
	b. Mess	4	Kamar VIP A (Kapasitas 1 Org)
		1	Kamar VIP B (Kapasitas 2 Org)
		8	Kamar VIP C (Kapasitas 4 Org)
		1	Kamar Standart (Kapasitas 10 Org)
	c. Bangunan Asrama	13	Tersebar di 8 Kota di Pulau Jawa :
			Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogya, Malang, Surabaya
	d. Bangunan Khusus	1	Anjungan Daerah Kalbar Taman Mini Indonesia Indah
2.	Asset yang Bergerak		
	a. Kendaraan Roda Empat	6	Mobil Operasional kegiatan protokoler)

3. ASPEK PELAYANAN URUSAN WAJIB

Beberapa indikator yang dapat mengidentifikasi tingkat kemajuan pelayanan bidang urusan wajib yang dilaksanakan melalui 9 program kegiatan sebagaimana table berikut :

Table 2.7 Target Dan Realisasi Program SKPD

NO	URAIAN SPM	TARGET TAHUN 2022			CAPAIAN TAHUN 2022	
		VOLUME	SATUAN (RP)	%	REALISAI (RP)	%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		74.371.735,00	100	64.466.082,00	87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.546.545.252,00	100	3.378.791.696,00	96
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		52.714.000,00	100	43.094.108,00	82
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.066.000,00	100	10.303.848,00	86
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		258.401.046,00	100	222.099.896,00	86
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		146.083.422,00	100	142.597.000,00	98
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		394.216.250,00	100	360.156.965,00	92
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		322.182.567,00	100	303.606.011,00	95
9.	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		1.446.189.804,00	100	1.367.465.971,08	95
	JUMLAH		6.252.770.076,00	100	5.892.581.577,00	94,24

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 3 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.371.735,00 dengan capaian kinerja 86,68 %.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah memiliki 3 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.546.545.252,00 dengan capaian kinerja 95,27 %.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki 1 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.714.000,00 dengan capaian kinerja 81,75 %.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 1 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.066.000,00 dengan capaian kinerja 85,40 %.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 6 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 258.401.046,00 dengan capaian kinerja 85,95 %.

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 1 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.083.422,00 dengan Capaian Kinerja 97,61 %.
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 4 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.394.216.250,00 dengan capaian kinerja 91,36 %.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 6 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.182.567,00 dengan capaian kinerja 94,23 %.
2. Program Pelayanan Penghubung
- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat alokasi anggaran sebesar Rp. 833.078.531,00 dengan capaian Kinerja 95,79 %
 - b. Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya alokasi anggaran sebesar Rp. 205.180.000,00 dengan capaian kinerja 97,77%
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung alokasi anggaran sebesar Rp. 407.931.273,00 dengan capaian kinerja 90,43%

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pada tahun 2022 melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Table 2.8 Realisasi Anggaran Yang Telah Terserap Untuk Program Kegiatan Core Bisnis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Di Jakarta Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4.806.580.272	100 %	4.525.115.606	94,14
2.	Program Pelayanan Penghubung	1.446.189.804	100 %	78.723.833	94,56
TOTAL		6.252.770.076	100 %	5.892.581.577	94,24

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan wajib yang merupakan prioritas (Core Bisnis) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemda (Penghubung)

Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Gubernur dan DPR, DPD RI serta pejabat lainnya.

Program ini melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan guna penyampaian informasi atau koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan terkait di Jakarta dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi maupun Pejabat-Pejabat Pemda. Kegiatan ini menjadi prioritas utama

untuk semua kegiatan kedinasan selama di Jakarta maupun daerah lain se jabotabek, baik yang dilaksanakan pada hari libur maupun hari-hari besar sesuai dengan kegiatan /acara pada saat itu. Adapun permasalahan umum pada program ini sebagai berikut :

Permasalahan :

- 1) Belum adanya networking dengan Kedutaan Besar Negara Asing di Jakarta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Kalimantan Barat secara umum. Hal ini menjadi tidak masalah karena dimungkinkan para pejabat telah menjalin networking secara langsung ke lembaga-lembaga Pemerintah se Jabotabek.
- 2) Distribusi SDM yang masih dibutuhkan sebagai tenaga lapangan yang khusus dan menguasai semua Kelembagaan Pemerintahan se Jabotabek.
- 3) Minimnya sarana dan prasarana / fasilitas kendaraan dinas yang terbatas, sehingga keterlambatan dapat terjadi dalam rangka penyampaian informasi atau Koordinasi dengan Lembaga- lembaga Pemerintah terkait se Jabotabek.
- 4) Belum terlaksananya Diklat / pembekalan bagi SDM Hubungan Antar Lembaga untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam rangka meningkatkan hubungan interaksi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

2. Program : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemda

a. Kegiatan: Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah / Wakil dan Pejabat Daerah

Pengelolaan protokoler adalah salah satu kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan, merupakan kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka menunjang kegiatan para pejabat eksekutif dan legislatif se-Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya. Kegiatan Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala daerah / Wakil dan Pejabat Daerah menjadi sangat penting. oleh karena itu permasalahan yang memang harus diatasi adalah personil yang cakap, tanggap serta mampu untuk melakukan tugas keprotokolan

Permasalahan :

- 1) Terbatasnya kualitas SDM keprotokolan
- 2) Tidak adanya kegiatan Diklat Keprotokolan
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana kendaraan dinas dalam rangka memperlancar urusan keprotokolan.

b. Kegiatan: Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan

Permasalahan :

- 1) Belum Optimalnya pendayagunaan Anjungan Kalimantan Barat di Taman Mini Indonesia Indah sebagai show window bagi pariwisata dan budaya Kalimantan Barat di Jakarta. Hal ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah kekayaan budaya daerah yang ada di anjungan untuk dipromosikan.

- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan.
 - 3) Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya bidang seni budaya secara optimal dan terpadu dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pagelaran kesenian dan kebudayaan.
 - 4) Terbatasnya kualitas sumber daya dibidang seni budaya Kalbar yang kompeten dan mendukung kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan.
- c. Kegiatan: Penyediaan jasa penggunaan tanah, bangunan Gedung dan rumah, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan berupa fasilitasi pembayaran PBB asrama Mahasiswa.**
- Permasalahan :
- 1) Keterlambatan pembayaran dikarenakan dari pihak asrama yang kurang kooperatif
 - 2) Belum optimalnya penerapan sistem perpajakan, mekanisme dan proses pelayanan pajak bagi asrama mahasiswa Kalimantan Barat.
 - 3) Belum optimalnya koordinasi dan kesadaran pihak asrama terhadap kepatuhan pembayaran PBB.
- d. Kegiatan : Pengelolaan Mess Daerah**
- merupakan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat tiap tahunnya. Adapun permasalahan yang ada dapat diatasi sehingga meminimalisir keadaan yang kurang kondusif.
- Permasalahan :
- 1) Terbatasnya SDM yang kompeten dalam urusan pengelolaan mess
 - 2) Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme pengelolaan mess
 - 3) Belum optimalnya ketersediaan data dalam rangka pengelolaan mess
 - 4) Kurangnya promosi dalam rangka memperkenalkan mess daerah
 - 5) Belum adanya pembinaan yang terukur terhadap kinerja pengelolaan mess
 - 6) Kurangnya minat dan kesadaran para tamu untuk menginap di mes

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL

Perencanaan kerja merupakan proses penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk lima tahunan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang telah diusulkan.

Review terhadap rancangan awal meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Selama Tahun 2022 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Telah merealisasikan Anggaran APBD Sebesar Rp.5.892.581.577,00 yaitu sebesar 94,24 % dari total anggaran sebesar Rp. 6.252.770.076,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai: Rp. 3.522.977.858,00
2. Belanja Barang dan jasa: Rp. 2.493.903.718,00
3. Belanja Modal : Rp. 289.888.500,00

Capaian angka partisipasi tahun 2022 sebesar 94,24 % sedangkan capaian program sesuai target anggaran sebesar 100 % ini berarti telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang urusan pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat dalam program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

BAB III

PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (BADAN PENGHUBUNG)

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala – kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Perumusan program kerja di bidang penghubung
2. Perumusan kebijakan di bidang penghubung
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penghubung
4. Pengkoordinasian di bidang penghubung
5. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan
6. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penghubung
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penghubung
8. Penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga - lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya
9. Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya
10. Pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya
11. Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya
13. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Lingkungan Badan Penghubung;
14. Pengelolaan anjungan daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dan daerah lainnya
15. Penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten / Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur
16. Pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi Pejabat Eksekutif dan Legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya

17. Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
18. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN KERJA

Berdasarkan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, maka tujuan dan sasaran program kegiatan Badan Penghubung dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Table 3.1 Hubungan Visi / Misi Dan Tujuan / Sasaran Program Kegiatan

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Tahapan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Tersedianya Dokumen DPA- -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
3.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
4.	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
5.	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun
			Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
			Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
6.	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Tersedianya Bahan/Material
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Tersedianya Alat Besar

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
			Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
			Tersedianya Mebel
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya
			Tersedianya Aset Tak Berwujud
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
9.	Meningkatnya Layanan Penghubung	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
			Terlaksananya Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 prioritas program kegiatan dikelompokkan kedalam dua prioritas program pembangunan yaitu :

a. Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemda (Badan Penghubung).

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui prioritas program tersebut, maka ditetapkan fokus-fokus prioritas yang terdiri dari :

Kegiatan 1 : Meningkatkan Partisipasi dan Kemitraan antar Sektor dan Pemda.

Untuk meningkatkan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemda, salah satunya melalui fasilitasi kegiatan Gubernur serta pejabat lainnya. Dengan capaian program : Peningkatan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemda target kinerja 100 %, keluaran Fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya dengan target capaian kinerja 15 Kali dalam 1 tahun. Kelompok sasaran Gubernur/Wakil Gubernur Pejabat lainnya dan Pegawai.

b. Program Peningkatan Layanan Penghubung.

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui prioritas program, maka ditetapkan fokus-fokus prioritas yang terdiri dari:

Kegiatan 1 : Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada hari - hari libur.

Untuk meningkatkan layanan penghubung pada prioritas program ini melalui kegiatan Piket hari-hari libur, dengan capaian program : Optimalnya pelayanan kedinasan dan pariwisata, target kinerja 100 %, keluarannya Jumlah pelayanan kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada hari – hari libur / kegiatan piket hari hari libur, hasil yang diharapkan meningkatnya jumlah pelayanan kedinasan dan tamu pada hari – hari libur di Badan Penghubung dan

Anjungan Kalimantan Barat, dengan kelompok sasarannya adalah Pegawai, pejabat dan pengunjung dan target capaian kinerja 17 orang pegawai dalam 1 tahun.

Kegiatan 2 : Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/ Wakil dan Pejabat Daerah di Jabotabek.

Untuk meningkatkan layanan penghubung, salah satunya melalui pengelolaan protokoler dan perjalanan kepala daerah / wakil dan pejabat daerah. Dengan target kinerja 100 %, keluarannya Jumlah pengelolaan protokoler Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek, hasil yang diharapkan terwujudnya pelayanan protokoler Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah lainnya, kelompok sasarannya adalah pejabat dan pegawai, dengan target capaian kinerja 48 kali didalam 1 tahun.

Kegiatan 3 : Terselenggaranya kegiatan Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan.

Untuk meningkatkan layanan penghubung pada prioritas program ini adalah melalui Pelaksanaan Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan, dengan target kinerja 100 %, keluarannya jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan dengan target kinerja mempromosikan kesenian dan kebudayaan Kalimantan Barat dengan target kinerja 100 %, kelompok sasarannya adalah Pegawai dan pengunjung, dengan target capaian kinerja 12 kali dalam 1 tahun.

Kegiatan 4 : Tersedianya Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung.

Untuk meningkatkan layanan penghubung pada prioritas program ini adalah melalui kegiatan Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung dan Rumah, target kinerja 100 %, keluarannya Jumlah pembiayaan PBB dan sewa Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat dengan target kinerja 13 PBB dan 3 Sewa Gedung, hasil yang diharapkan Terpenuhinya kewajiban pembayaran PBB dan sewa Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat dengan target capaian kinerja 100 %, dengan kelompok sasarannya adalah asrama Mahasiswa.

Kegiatan 5 : Peningkatan kegiatan pengelolaan Mess Daerah.

Untuk meningkatkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda pada prioritas program ini adalah melalui kegiatan Pengelolaan Mess Daerah, dengan target kinerja 100 %, keluarannya jumlah pengelolaan mess daerah target kinerja 1 Mess Daerah, hasil yang diharapkan meningkatnya pelayanan pengelolaan mess daerah selama 1 tahun, dengan kelompok sasaran adalah Pegawai dan tamu mess, dengan target capaian kinerja 1 Mess dalam 1 tahun.

Kegiatan 6 : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat.

Untuk meningkatkan layanan penghubung pada prioritas program ini adalah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Asrama Mahasiswa

Kalimantan Barat dengan target kinerja 100 %, keluarannya Jumlah monitoring dan evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat, hasil yang diharapkan Terwujudnya pembinaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat dengan target capaian kinerja 16 Asrama, dengan kelompok sasarannya adalah Asrama Mahasiswa.

Kegiatan 7 : Terselenggaranya Pawai Budaya.

untuk meningkatkan layanan penghubung pada prioritas program ini adalah melalui Pawai Budaya, dengan target kinerja 100%, keluarannya jumlah kegiatan Pawai Budaya dengan target capaian kinerja 1 kali dengan kelompok sasarannya pegawai dan pengunjung.

Table 3.2 Program Dan Kegiatan Prioritas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

NO	PRIORITAS PROGRAM BADAN PENGHUBUNG	KINERJA		PELAKSANA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemda	Jumlah Fasilitas kegiatan Gubernur serta Pejabat Lainnya	48 Kali	Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
2.	Program Peningkatan Layanan Penghubung	Jumlah Pelayanan kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat pada hari – hari	17 orang	Sub Bagian Tata Usaha
		Jumlah Pengelolaan Protokoler Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	48 Kali	Sub Bidang Pelayanan
		Jumlah Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	12 Kali	Sub Bidang Promosi Daerah
		Jumlah Pembiayaan PBB dan Sewa untuk Asrama Mahasiswa Kalimantan Baratse-Jawa	13 PBB, 3 Sewa Gdg	Sub Bagian Tata Usaha
		Jumlah Pengelolaan Mess Daerah	1 Mess	Sub Bidang Pelayanan
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Asrama Kalimantan Barat	16 Asrama	Sub Bidang Pelayanan
		Jumlah kegiatan Pawai Budaya	1 Kali	Sub Bidang Promosi Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT						6.858.244.086,00								0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.858.244.086,00								0,00	
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG						6.858.244.086,00								0,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	100 % 100 Nilai 100 persen 100 %			BB Nilai BB Nilai	5.541.406.778,00							99 % 98 Nilai 100 persen 98 %	0,00	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen 7 Dokumen			7 Dokumen	57.128.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	7 Dokumen 7 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	12.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	11.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	4 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	11.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	5.779.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
5.07.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			2 Laporan	10.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	4 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
5.07.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	4.861.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	4 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
5.07.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen - -			100 %	3.527.042.088,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	3 Dokumen - -	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
5.07.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan			28 Orang/ Bulan	3.361.044.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	36 Orang/ Bulan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
5.07.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen			12 Dokumen	154.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	18 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
5.07.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			2 Laporan	11.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	12 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.07.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi barang milik daerah	- - 3 Dokumen			7 Laporan	44.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	- - 3 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30 Dokumen			22 Dokumen	44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	26 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	24 Laporan			0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	18 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan			0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	18 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan			0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	18 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	18 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- - 2 Laporan			100 %	21.491.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	- - 2 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	50 Paket			40 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	45 Paket	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	18 Dokumen			6 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	12 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	18 Orang			6 Orang	17.131.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	12 Orang	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	18 Orang			6 Orang	4.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	12 Orang	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1 Laporan - -			100 %	373.249.498,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	1 Laporan - -	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	45 Paket			30 Paket	33.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	36 Paket	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket			10 Paket	52.806.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	15 Paket	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket			15 Paket	24.588.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	20 Paket	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			6 Paket	40.264.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	9 Paket	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket			18 Paket	56.637.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	22 Paket	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen			4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	8 Dokumen	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan			55 Laporan	165.793.788,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	62 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- - 10 Unit			100 %	702.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	- - 9 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.07.01.1.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	697.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	2 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	2 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	5 Paket	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit			1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	18 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.07.0008		Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit			15 Unit	4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	25 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			25 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	6 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- - 1 Laporan			100 %	452.467.194,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	- - 1 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan			24 Laporan	6.980.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	36 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			15 Laporan	431.986.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	20 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan			6 Laporan	8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	12 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			6 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	10 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit - -			100 %	364.029.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	6 Unit - -	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
5.07.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit			8 Unit	284.809.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	7 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya	8 Unit			8 Unit	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	7 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit			15 Unit	33.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	20 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			6 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	8 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			6 Unit	5.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	6 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit			14 Unit	5.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Badan Penghubung	18 Unit	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Fasilitas Daerah di luar wilayah Kalimantan Barat	80 %			80 %	1.316.837.308,00						80 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase pemenuhan layanan kedinasan antar lembaga Persentase peningkatan kunjungan ke fasilitas promosi daerah diluar wilayah Kalimantan Barat	- - - -			100 % 15 %	1.316.837.308,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Pimpinan Daerah dan Masyarakat	- - - -	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	18 Laporan			6 Laporan	828.146.332,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Pimpinan Daerah dan Masyarakat	12 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	18 Laporan			6 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Pimpinan Daerah dan Masyarakat	14 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	18 Laporan			12 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Pimpinan Daerah dan Masyarakat	14 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	35 Laporan			29 Laporan	433.690.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Pimpinan Daerah dan Masyarakat	32 Laporan	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
J U M L A H								6.858.244.086,00							0,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta, Pada tahun 2022 pagu indikatif di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.6.252.770.076,00,- (Enam Milyar Dua ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribuh Tujuh Puluh Enam Ruppiah) dan pada tahun 2024 pagu indikatif sebesar Rp. 6.858.244.086,00,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribuh Delapan Puluh Enam Ruppiah) mengalami kenaikan sebesar Rp.605.374.010,00,- (Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribuh Sepuluh Ruppiah) dari tahun 2022.

Rencana Kerja tahun 2024 pada Badan Penghubung disesuaikan dengan pagu indikatif yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan rencana kerja serta sangat menentukan pencapaian target kinerja Renstra Tahun 2024 – 2026.

Selanjutnya dalam penyampaian Rencana kerja ini juga dibahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan, Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2022, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Pencapaian kinerja program kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari aspek Kelembagaan serta kualitas SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsi, dukungan dan peranan aktif yang maksimal dan paling menentukan keberhasilan dan kualitas kerja Perangkat Daerah. Selain itu hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Etos kerja, kedisiplinan dan loyalitas
- Kemampuan teknis dan profesionalisme personil / aparatur
- Mekanisme reward and punishment yang proporsional
- Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disesuaikan dengan sistematika yang telah ditentukan. Renja ini tentunya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan pedoman dalam upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah kedepan.

Demikian Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

Jakarta, 31 Maret 2023

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Kalimantan Barat



ABDUL GANI.S.H.

Pembina (IV/a)

NIP.1972082119997031006